

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Hubungan bilateral merupakan kegiatan yang saling menguntungkan yang dilakukan oleh dua negara (Oye, 1985). Kemitraan strategis¹ menjadi pilihan baru dalam menjalin hubungan bilateral di era seperti saat ini. Kesamaan tujuan strategis mendorong intensitas hubungan yang mendalam, hal inilah yang mendorong implementasi kerjasama jangka panjang (Czechowska, 2013).

Mengapa negara menjalin hubungan bilateral? Beberapa pendekatan akademik dalam studi Hubungan Internasional memiliki argumen masing-masing mengenai faktor di balik kerjasama bilateral. Realis mengemukakan argumen dasar mengenai dunia internasional yang anarki. Anggapan realis bahwa kekuatan militer adalah satu-satunya cara mencapai keamanan menjadikan negara-negara bekerjasama untuk menyalurkan kekuatan, serta menyeimbangkan ancaman dari luar (*balance of threat*), semata untuk memenuhi kepentingan keamanan (Jervis, 1988). Singkatnya, negara-negara bekerjasama untuk memenuhi agenda keamanan masing-masing (Jervis, 1978; Oye, 1985; Jervis, 1988).

Asumsi dasar liberal mengenai demokrasi dan interdependensi menyokong peningkatan kebebasan individu dan kesejahteraan. Dalam hubungan bilateral, capaian utama yang diinginkan suatu negara adalah kesejahteraan (Oneal & Russett, 1997). Interdependensi dalam hubungan dagang yang dilakukan oleh negara adalah cara mencapai integrasi dan menghindari konflik (Mitrany, 1966). Liberal institusional berargumen bahwa negara berkumpul dan membentuk institusi untuk memudahkan mereka dalam mencapai kepentingan umum, utamanya adalah pemenuhan kepentingan ekonomi (Keohane, 1989, 2003; Oneal & Russett, 1997)

Di sisi lain, konstruktivisme mengemukakan pentingnya faktor-faktor non-material seperti ide, norma, dan identitas sebagai kunci analisis (Wendt, 1992).

¹ merupakan hubungan bilateral, yang menitikberatkan pada fleksibilitas institusi, dan kedekatan mendalam, serta intensitas hubungan antar subjek dengan tetap menjaga kedaulatan, dan dipastikan melalui integritas tujuan strategis

Konstruktivis berpendapat bahwa kepentingan nasional merupakan sebuah konstruksi yang dibuat negara (Barkin, 2003). Konstruktivis menggunakan identitas sebagai argumen utama dalam melihat kerjasama antar negara, dimana negara bekerjasama untuk menciptakan identitas kolektif. Identitas kolektif merupakan latar belakang sekaligus faktor penting dalam keberlangsungan kerjasama antar negara (Rousseau & Retamero, 2007; Lemmons, 2012, p.12) Kesamaan identitas dapat dikatakan sebagai pondasi utama bagi negara untuk mencapai tujuan bersama.

Ketiga teori tersebut telah berhasil menggambarkan hubungan bilateral melalui berbagai sisi yang berbeda. Namun demikian, penelitian ini menawarkan pendekatan alternatif dalam menganalisis hubungan bilateral dengan menggunakan pendekatan idiosinkretisme. Penelitian ini menggunakan studi kasus peningkatan status kemitraan strategis antara Indonesia dan Korea Selatan. Kedua negara telah menjalin kemitraan strategis yang erat di berbagai bidang meliputi politik, pertahanan, perdagangan dan investasi, pembangunan infrastruktur dan kebudayaan sejak tahun 2006. Kemitraan strategis ini telah ditingkatkan statusnya menjadi khusus. Status khusus ini menandai semakin eratnya hubungan kedua negara. Kedua negara sepakat untuk menjadikan kemitraan strategis khusus ini sebagai sarana untuk memberi kontribusi terhadap perdamaian, keamanan dan kesejahteraan baik regional maupun global (Kedutaan Besar Republik Korea untuk Republik Indonesia, 2017). Lebih dari itu, kedua pemimpin setuju untuk meningkatkan kerjasama dalam memberantas terorisme, kejahatan siber, dan kejahatan transnasional terorganisasi (Joint Statement, 2017).

Sebelumnya, Indonesia dan Korea Selatan melaksanakan kemitraan strategis dengan fokus utama persahabatan kedua negara serta perdagangan (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2007). Peningkatan status khusus dalam kemitraan ini membutuhkan waktu 11 tahun sejak pertama kali dicetuskan, juga dilakukan setelah kedua negara mengalami pergantian pemimpin. Intensitas hubungan dalam kemitraan strategis ini lebih meningkat daripada sebelumnya. Pasalnya kedua pemimpin negara memiliki kesamaan dalam visi-misi. Sektor

kerjasama jauh lebih luas dan memungkinkan kedua negara untuk berkontribusi lebih, baik regional maupun global.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat kaitan antara karakter personal pemimpin negara dan kemitraan strategis antara Indonesia dan Korea Selatan. Penelitian ini ingin menguji apakah faktor idiosinkretik mempengaruhi kerjasama bilateral Indonesia-Korea Selatan. Penelitian ini ingin memberikan perspektif alternatif dalam menganalisis hubungan bilateral antar negara. Peneliti percaya bahwa terdapat faktor lain selain faktor material yang dapat mempengaruhi terjalannya hubungan bilateral. Salah satunya adalah faktor karakter personal pemimpin negara.

I.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini berangkat dari pertanyaan utama: *“Apakah karakter personal Jokowi dan Moon Jae In mempengaruhi hubungan bilateral kedua negara dalam hal kemitraan strategis khusus?”*

Berdasarkan pertanyaan tersebut, penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan yang lebih spesifik:

1. Mengapa peningkatan status kemitraan strategis Indonesia dan Korea Selatan baru dilakukan setelah 11 tahun sejak kerjasama tersebut dicetuskan, terlebih lagi setelah pergantian pemimpin kedua negara?
2. Bagaimana karakter personal pemimpin negara (dalam hal ini Joko Widodo dan Moon Jae In) mempengaruhi peningkatan status kemitraan strategis antara Indonesia dan Korea Selatan?

I.3 Kerangka Teori

Perbedaan individu memiliki pengaruh yang besar dalam pembuatan kebijakan luar negeri, namun demikian perbedaan ini justru dapat dimanfaatkan untuk membentuk sistem pemahaman terhadap pemikiran dasar manusia (Neack, 2008). Penelitian ini akan menggunakan pendekatan idiosinkretisme yang dikemukakan oleh Margaret G. Hermann. Hermann (1980) mengutarakan pendekatan idiosinkretik dalam menganalisis kebijakan

luar negeri suatu negara. Ia membagi karakter personal seorang pemimpin menjadi dua tipe besar yaitu “*aggressive*” dan “*conciliatory*”. Tipe “*aggressive*” cenderung memiliki kebutuhan yang tinggi akan kekuasaan (*high need for power*), namun cenderung rendah dalam hal kompleksitas konseptual (*low conceptual complexity*). Selain itu, tipe pemimpin ini tidak mudah percaya (*high distrust to thers*), bersifat nasionalis (*high nationalism*) dan cenderung percaya bahwa mereka memiliki andil besar dalam setiap peristiwa dimana mereka terlibat (*high belief in own ability to control*). Sebaliknya, tipe pemimpin “*conciliatory*” cenderung memiliki kebutuhan afiliasi yang tinggi (*high need of affiliation*), serta memiliki kompleksitas konseptual yang tinggi (*high conceptual complexity*). Di samping itu, tipe pemimpin ini juga memiliki tingkat kepercayaan tinggi (*low distrust to others*), namun rendah dalam hal nasionalisme (*low nationalism*), dan cenderung menunjukkan sedikit kepercayaan pada kemampuan mereka dalam mengendalikan peristiwa dimana mereka terlibat (*little belief in own ability to control*). Dapat dikatakan bahwa, tipe pemimpin “*aggressive*” cenderung lebih *self-centered* dan cenderung individual. Sebaliknya, tipe “*conciliatory*” cenderung lebih bersahabat, dan mengutamakan kerjasama (Hermann, 1980).

Hermann juga mengemukakan empat tipe karakter personal yaitu; *belief*, *motives*, *decision style*, dan *interpersonal style*. Keempat tipe ini memiliki keterkaitan erat dengan pengambilan keputusan dalam merumuskan kebijakan luar negeri. *Belief* dikaitkan dengan asumsi fundamental pemimpin politik mengenai dunia. *Belief system* merupakan sebuah aspek yang memberikan gambaran mengenai “apa yang seharusnya”, berperan sebagai arahan dalam mencapai tujuan (McClelland (1962) dalam (Holsti, 1962)). *Belief* seringkali dikaitkan pada pertanyaan terkait kemungkinan terjadinya suatu fenomena, dan kapabilitas seseorang dalam mengontrol suatu kejadian. *Belief* juga merupakan aspek utama yang mempengaruhi interpretasi pemimpin negara terhadap lingkungannya. Hermann menyebutkan bahwa dalam perkembangannya, *belief* berisi dua tipe personal karakteristik yang lebih spesifik, yaitu; nasionalisme dan keinginan untuk mendominasi. Dengan kata

lain, gambaran mengenai dunia dalam kepercayaan seorang pemimpin negara mempengaruhi rasa nasionalisme dan tinggi rendahnya keinginan untuk mendominasi (Hermann, 1980, p.9).

Sedangkan *motives* secara sederhana dikatakan sebagai alasan di balik seorang pemimpin politik melakukan suatu tindakan. Kebutuhan seorang pemimpin akan kekuasaan seringkali disebut sebagai motif utama seorang pemimpin politik. Selain itu, kebutuhan akan afiliasi dan penerimaan juga disebut sebagai motif pemimpin politik melakukan sebuah tindakan. Hal ini mempengaruhi pandangan pemimpin politik dalam menginterpretasikan lingkungannya serta strategi apa yang akan ia gunakan. Kedua motif tersebut muncul sebagai pengaruh terhadap perilaku politik luar negeri dalam suatu pemerintahan (Hermann, 1980, p.9).

Decision style, diartikan sebagai metode dalam mengambil keputusan. Hal ini merupakan gambaran mengenai bagaimana seorang pemimpin politik membuat kebijakan. *Decision style* memiliki komponen pembangun yaitu keterbukaan terhadap informasi baru, preferensi terhadap tingkat resiko tertentu, kompleksitas dalam penerimaan informasi, serta kemampuan menoleransi ambiguitas (Hermann, 1980, p.10). Namun demikian, yang paling utama adalah kompleksitas konseptual seorang pemimpin politik dalam membuat kebijakan (Driver, 1977).

Karakter personal yang terakhir, yaitu *interpersonal style*, karakter ini merupakan gambaran mengenai bagaimana seorang pemimpin berhubungan dengan pemimpin politik lain. Karakter ini muncul ketika seseorang menjalin hubungan dengan orang lain, tercermin melalui perilaku dan sifat ketika berhadapan dengan orang lain. Terdapat dua jenis *interpersonal style* menurut Hermann; *paranoia* (curiga berlebih) dan *Machiavellianism* (perilaku manipulatif). Dua karakter interpersonal ini erat kaitannya dengan pemimpin politik yang memiliki "*warfare personality*" atau suka berperang (Hermann, 1980). Dalam karakter ini terdapat rasa percaya terhadap pihak lain yang mengarahkan hubungan antara kedua pihak, apakah akan menuju kerjasama atau justru sebaliknya.

Laura Neack (2008), dalam bukunya, mengemukakan beberapa jenis *set of conduct* yang dapat mempengaruhi karakter personal pemimpin negara, diantaranya *cognition* dan *operational code*. Dalam pemahaman mengenai *cognition* terdapat kaitan dengan sekumpulan *belief* yang sedikit banyak memberikan pengaruh pada cara seseorang melihat suatu fenomena. A *belief set* merupakan sebuah bingkai pemahaman yang dibuat oleh seorang individu dalam melihat suatu fenomena. Melalui bingkai ini, seseorang bisa memilah mana informasi yang sesuai dengan apa yang ia percaya dan mana yang tidak sesuai (Neack, 2008, p.54). Seorang individu tidak hanya menggunakan *existing belief* untuk membuang informasi yang tidak sesuai, namun juga untuk menginterpretasikan informasi baru. Informasi tersebut dikenali sebagai hal yang sesuai dengan *belief* yang ada, lalu disimpan. *Existing belief* yang berkembang dan sudah tertanam dalam masyarakat tertentu cenderung lebih kaku dan sulit untuk berubah (Hirshberg, 1993, p.90). Namun, bukan tidak mungkin *a set of belief* akan berubah jika dipengaruhi oleh faktor luar.

Pendekatan kognitif melihat bagaimana seorang individu membuat keputusan melalui cara yang berbeda dalam melihat dan memahami lingkungannya. Pendekatan ini tidak melihat kesadaran, keterbukaan pikiran dan adaptabilitas individu sebagai sesuatu yang obyektif melainkan subjektif – berada dalam “lingkungan psikologi” individu tersebut (Rosati, 2000, p.50). Inilah mengapa *belief* dan *cognition* saling mempengaruhi satu sama lain. Namun demikian, seorang individu bisa saja salah mengartikan informasi baru yang ia terima, sehingga mengakibatkan individu menjadi seorang *cognitive miser* yang melihat sesuatu secara sekilas dan tidak berpikir lebih jauh. Hal ini bisa menimbulkan kesalahan dalam menghasilkan kebijakan luar negeri.

Di sisi lain, Alexander Goerge (1989), mengemukakan pendapat mengenai *operational code*. Ia mengambil definisi *operational code* Nathan Leites dimana hal ini didefinisikan sebagai satu set *general belief* mengenai pemahaman dasar sejarah dan pertanyaan mengenai politik, utamanya dalam hal pengambilan tindakan. *Belief* dan premis yang diambil Leites dinilai lebih fleksibel dan halus ketimbang istilah “*operational code*” itu sendiri.

Operational code digambarkan sebagai kaca mata yang mempengaruhi persepsi dan penilaian aktor terhadap suatu fenomena politik tertentu. *Operational code* sebagai *set of belief* memberikan standar tertentu bagi seorang aktor dalam menyusun strategi dan taktik politik. Hal ini bisa saja berubah tergantung pada situasi tertentu yang dihadapi (George, 1989, p.191). Meskipun *operational code* dapat diubah atau dimodifikasi pada situasi tertentu, *operational code* seorang pemimpin politik tetap bersandar pada satu set inti preferensi aktor. Oleh karenanya, diharapkan pola preferensi seorang pemimpin negara merupakan kecenderungan yang akurat terkait dengan sifat dan perilaku kondisi politik (Crichlow, 1998, p.687).

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan salah satu tipe besar karakter personal, yaitu *conciliatory*. Sedangkan untuk menunjang argumen dalam menganalisis hubungan bilateral menggunakan idiosinkretik, peneliti akan menggunakan *belief, motives, decision style* serta *interpersonal style*. Karakter personal ini cenderung memenuhi kebutuhan peneliti untuk menganalisis pengaruh idiosinkretik dalam hubungan bilateral.

Tipe pemimpin *conciliatory* mengindikasikan kebutuhan untuk menjalin dan menjaga hubungan pertemananan dengan negara lain, sebuah kemampuan untuk mempertimbangkan solusi alternatif yang lebih luas dalam kaitannya dengan pengambilan keputusan, tingkat kecurigaan yang kecil terhadap motif pihak lain, tidak memiliki perhatian berlebih terhadap identitas nasional dan kedaulatan, dan cenderung kurang tertarik dalam menginisiasi tindakan. Pemimpin tipe ini cenderung memiliki kebijakan luar negeri yang bersifat *participatory*. Tipe karakter personal ini, cenderung membawa negaranya untuk berinteraksi dengan negara lain untuk melihat secara langsung nilai yang dimiliki oleh negara lain, serta mencari tahu nilai yang bisa diambil dan diterapkan di negaranya. lebih dari itu, tipe ini cenderung bekerjasama dan berinteraksi dengan negara lain untuk melihat solusi alternatif yang lebih luas dalam memecahkan permasalahan. Mereka cenderung akan menjadi selaras terhadap apa yang terjadi dalam hubungan internasional, dan menjadi sensitif serta responsif terhadap lingkungan sekitar (Hermann, 1980).

Penelitian ini juga akan menggunakan *belief* untuk membingkai pandangan seorang pemimpin negara berdasarkan nilai-nilai yang melekat pada dirinya. Dalam konteks hubungan bilateral, kesamaan *belief* antar pemimpin negara merupakan pondasi dalam menjalin hubungan yang lebih intens. Di sisi lain, *motives* akan digunakan sebagai acuan dalam melihat kesamaan alasan dibalik terjalinnya hubungan bilateral. Motif pemimpin negara bisa jadi sangat berbeda, namun demikian dengan dorongan keinginan bekerjasama, motif dibalik tindakan yang diambil oleh pemimpin negara bisa berubah seiring dengan kesamaan tujuan (Hermann, 1980)..

Terakhir adalah *interpersonal style*. Karakter personal satu ini merupakan kunci dalam menjalin hubungan dengan negara lain. Cara seorang pemimpin negara berhubungan dengan pemimpin negara lain bisa mengarahkan hubungan kedua negara menuju situasi lebih intens atau justru sebaliknya (Hermann, 1980). Ketiga instrumen tersebut akan peneliti akan bingkai menggunakan lima indikator karakter personal menurut Hermann, yaitu *nationalism*, *belief in own ability to control*, *need of affiliation*, *conceptual complexity*, dan *distrust to others*. Lima indikator ini digunakan untuk menganalisis lebih detail mengenai karakter personal pemimpin negara dalam hal kebijakan luar negeri dan keputusan yang diambil. Dalam kasus peningkatan status kemitraan strategis antara Indonesia-Korea Selatan, indikator tersebut akan digunakan dalam menganalisis kebijakan diplomasi ekonomi Jokowi dan kebijakan *look-south* Moon Jae-in. Baru kemudian akan dikaitkan dengan peningkatan status kemitraan antar kedua negara.

I.4 Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah: Peningkatan status khusus dalam kemitraan strategis antara Indonesia dan Korea Selatan dipengaruhi oleh karakter personal Jokowi dan Moon Jae In. Karakter personal kedua pemimpin tersebut mempengaruhi intensitas kerjasama antar negara, dimana dalam konteks hubungan bilateral, intensitas hubungan menjadi kunci utama dalam keberlangsungan kerjasama tersebut. Keduanya sama-sama merupakan

tipe *conciliatory* yang mengedepankan kerjasama untuk mencapai tujuan strategis. Lebih dari itu, keduanya memiliki kesamaan nilai dalam visi-misi mereka. Kedua pemimpin tersebut memiliki keyakinan yang sama bahwa dalam mencapai kepentingan nasional dibutuhkan kerjasama yang intens dan berkelanjutan, lebih dari itu kepentingan domestik merupakan landasan yang esensial. Selain itu keduanya juga memiliki kesamaan *interpersonal style* yaitu cenderung lebih mengutamakan pertemuan *dyadic* yang intens melalui kunjungan-kunjungan kenegaraan. Hal inilah yang mendorong perubahan status kemitraan strategis Indonesia-Korea Selatan menjadi khusus.

I.5 Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka. Penelitian ini bersifat *theory testing*, sehingga akan lebih banyak mengandalkan studi biografi sebagai bahan komparasi mengenai penggunaan konsep idiosinkretisme. *Theory testing* merupakan salah satu kegunaan dari penelitian empiris. Penelitian yang bersifat *theory testing* merupakan penelitian yang menaksir validitas sebuah teori terhadap variabel yang berbeda dari variabel yang biasa digunakan. Penelitian yang bersifat *theory testing* didasarkan pada premis bahwa pembatasan pada variabel tertentu pada suatu teori justru akan menjadi pembuktian dalam pengujian empiris suatu penelitian (Lind & Walker, 1979).

Selain itu, penulis juga akan menggunakan teknik studi pustaka untuk mengumpulkan bukti-bukti yang mengarah pada personal karakter, berupa teks pidato dan pernyataan pemimpin negara. Untuk metode analisis data, penelitian ini menggunakan metode *content analysis* (analisis isi). Peneliti memandang analisis isi sebagai metode yang fleksibel untuk menganalisis data (Cavanagh, 1997). Metode analisis isi mendeskripsikan pendekatan analisis mulai dari analisis impresionistik, intuitif, hingga interpretatif terhadap analisis tekstual yang sistematis dan kaku (Rosengren, 1981). Dalam penelitian ini, metode *content analysis* yang dipakai merupakan *qualitative content analysis* dengan memanfaatkan *discourse analysis* (analisis teks

berdasarkan level kalimat); *rhetorical analysis* (analisis teks yang mengandung retorika berupa pidato dan pernyataan); dan *conversation analysis* (analisis yang bertumpu pada interaksi verbal misalnya teks wawancara) (Krippendorff, 2004).

I.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan terbagi dalam lima bab. Bab 1 merupakan pendahuluan yang berisi rancangan riset dari penelitian ini. Bab ini berisi justifikasi penelitian, tinjauan pustaka, serta tujuan dari penelitian ini dilakukan. Bab 2 merupakan deskripsi perbandingan status kemitraan strategis Indonesia-Korea Selatan. Hal yang akan didiskusikan dalam bab ini adalah peningkatan status kemitraan strategis Indonesia-Korea Selatan, perbedaan mendasar sebelum dan sesudah peningkatan status, serta intensitas hubungan kedua pemimpin negara.

Bab 3 akan membahas mengenai pengaruh faktor idiosinkretik Jokowi dan Bab 4 akan membahas mengenai faktor idiosinkretik Moon Jae In dalam kemitraan strategis khusus Indonesia-Korea Selatan. Fokus utama kedua bab ini adalah analisis kecocokan antara faktor idiosinkretik terhadap kerjasama bilateral Indonesia-Korea Selatan. Bab ini akan mengelaborasi lebih lanjut masing-masing tipe karakter personal Jokowi dan Moon Jae In dan melihat kaitannya dengan kemitraan strategis khusus yang dijalin kedua negara.

Bab 5 merupakan penutup yang berisi kesimpulan, serta saran-saran penelitian lebih lanjut. Bab ini akan memaparkan hasil penelitian. Apakah hipotesis peneliti dinyatakan benar atau justru sebaliknya. Bab ini akan mengevaluasi kekurangan peneliti serta memberikan rekomendasi bagi penelitian selanjutnya.